

Identitas Manusia Indonesia Sesuai Nilai Pancasila Dan Kebhinnekaan Di SMA Negeri 2 Palembang

Retno Riski Utama¹, Effendi Nawawi²

^{1,2}FKIP Universitas Sriwijaya

E-mail: retnoriskiutama68@gmail.com effendi@fkip.unsri.ac.id

Article History:

Received: Februari 2023

Revised: Februari 2023

Accepted: Februari 2023

Abstract: Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Saat sekarang ini, banyaknya terdapat berita tentang perilaku intoleransi di kalangan pelajar, sebagai contoh maraknya perundungan di kalangan pelajar terkait perbedaan agama atau budaya. Hal ini perlu diatasi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar secara terstruktur dan sistematis. Profil Pelajar Pancasila merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Palembang. Profil Pelajar Pancasila dibentuk dikarenakan seiring perkembangan dan kemajuan zaman mulai terkikis nya pendidikan karakter peserta didik. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pada lingkungan SMA Negeri 2 Palembang sudah cukup menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti pembacaan Al-quran sebelum memulai pembelajaran. Tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan status sosial. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keragaman serta perbedaan pada bangsa Indonesia.

Keywords:

Bhinneka Tunggal Ika, Nilai-Nilai Pancasila, Profil Pelajar Pancasila.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen aneka ragam. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “multikultural nation state”. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan (Kusumohamidjojo, 2016).

Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya, tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia (Hardiman, 2002).

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Untuk itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukannya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia (Asmaroini, 2016).

(Kirnandita, 2017) memberikan fakta-fakta mencengangkan terkait perilaku intoleransi di kalangan pelajar. Salah satu contohnya maraknya perundungan di kalangan pelajar yang berhubungan isu agama. Anak-anak penghayat kepercayaan yang telah memegang KTP sering dirundung karena kolom agama di KTP kosong. Kondisi-kondisi demikian ini jika dibiarkan terus menerus dapat mengancam eksistensi NKRI. Sebagaimana diketahui bersama bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Maka menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar secara struktur dan sistematis perlu dilaksanakan dengan konsekuen.

Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai Negara. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era Globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini (Asmaroini, 2016).

Profil pelajar Pancasila merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membumikan nilai - nilai Pancasila di kalangan pelajar. Landasan filosofis Profil Pelajar Pancasila adalah pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pemikiran beliau tentang konsep pendidikan “ing ngarso sung tulandha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Konsep tersebut pula yang mengilhami munculnya merdeka belajar. Diantara konsep merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila saling beririsan. Dalam konsep merdeka belajar para peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih materi yang disukai dan diminatinya. Sementara pendidik berperan menjadi pribadi yang bertanggungjawab membentuk karakter peserta didik. Pendidik menjadi teladan ketika berada di depan, menjadi motivator ketika di tengah, dan menjadi pendorong ketika di belakang agar peserta didik mandiri. Karakter yang

diharapkan adalah pelajar yang memiliki jiwa-jiwa Pancasila di dalam dirinya (Rahayuningsih & Iskandar, 2022).

Kelangsungan hidup negara Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Tentu tidak akan maju Negara ini jika dibangun oleh generasi yang tidak bermoral. Untuk itu perlu pembenahan-pembenahan agar generasi penerus yang mendatang memiliki akhlak dan moral yang baik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar Negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, mengandung makna bahwa ideologi nasional tersebut sebagai cita-cita dan tujuan Negara (Asmaroini, 2016).

Harapan untuk ke depannya agar dapat menghasilkan pelajar Indonesia sebagai output sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang dimaksud adalah menyadari posisinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki jiwa demokratis dan unggul serta produktif di era kekinian. Harapannya para pelajar bisa berkontribusi dalam kancah pembangunan global yang berkesinambungan serta kuat dalam berbagai tantangan. Usaha yang ditempuh guna menciptakan pelajar Pancasila melalui beberapa cara seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, sekolah berbudaya kerja, ekstrakurikuler, dan intrakurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran (Juliani & Bastian, 2021).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif pada penelitian kualitatif berarti penelitian akan berusaha untuk membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu fakta, sifat, hingga hubungan antar fenomena yang diteliti. Seperti yang diungkapkan oleh Nazir (2014) bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, lembar survey, wawancara, dan dokumen. Dilaksanakan di SMA Negeri 2 Palembang yang terletak di Jl. Puncak Sekuning No. 84. Kecamatan: Ilir Barat I Kelurahan: Lorok Pakjo, Palembang 30137, Sumatra Selatan, Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil pelajar Pancasila dilihat dari sisi historis merupakan mandat dari presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang penetapan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan arahan dan visi dari menteri pendidikan dikatakan bahwa sistem pendidikan nasional wajib mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi (Rahayuningsih & Iskandar, 2022).

Latar belakang dibentuknya profil pelajar Pancasila berkenaan dengan mulai terkikisnya pendidikan karakter para peserta didik. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman para pelajar Indonesia mengalami disorientasi jati diri. Berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah memiliki inisiatif untuk memperkenalkan pelajar Indonesia yang di dalamnya terdapat pendidikan karakter. Wujudnya berupa pelajar Pancasila yang menjadi profil pelajar bangsa Indonesia. Orientasi dari profil pelajar Pancasila merupakan sumber daya manusia yang unggul. Kriteria peserta didik dinyatakan unggul jika mengimplementasikan prinsip belajar sepanjang hayat dengan kompetensi global dan laku hidupnya berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila (Ismail, 2021).

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan (Chan et al., 2019). Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa

Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila (Asmaroini, 2016).

Nilai Pancasila

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama. Pendidikan Pancasila pada dasarnya merupakan rumpun pendidikan kewarganegaraan yang mengkhususkan diri pada penanaman ideologi Pancasila ke dalam pribadi peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia (Margono, 2012)

Pada lingkungan SMA Negeri 2 Palembang, di setiap ruang kelas memiliki gambar atau foto Garuda Pancasila yang diletakkan di depan kelas berada di atas papan tulis bersamaan dengan foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang sedang menjabat. Hal ini merupakan salah satu bentuk sekolah menjunjung tinggi Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan identitas warga sekolah sebagai warga negara Indonesia. Wujud pelajar Indonesia adalah pelajar yang mempunyai prinsip belajar sepanjang hayat dan kompetensi global dan laku hidupnya berpegang teguh pada nilai moral Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Setiap sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi, sila pertama hingga sila kelima memiliki nilainya masing-masing sehingga dapat dijadikan landasan dalam kehidupan di sekolah.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada SMA Negeri 2 Palembang salah satu penghayatan dan pemahaman nilai ketuhanan yaitu peserta didik melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran pada jam ke 0 sekitar 15 menit sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan karakter serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan

pembelajaran. Menghargai dan menghormati warga sekolah yang melakukan ibadah sholat dzuhur berjamaah. Serta, berteman baik dengan teman yang memiliki agama berbeda.

Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan, 2007).

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) kepada seluruh peserta didik. Tidak membedakan ras, suku, agama, status sosial dalam pembelajaran. Saling menghormati sesama teman dan guru di sekolah. Menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Serta memiliki tanggung jawab sebagai seorang peserta didik, seperti menaati tata tertib sekolah.

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Menunjukkan rasa cinta tanah air dengan selalu mengikuti upacara bendera setiap hari senin dengan tertib, upacara hari sumpah pemuda dan hari guru Nasional. Menghargai dan menghormati perbedaan ras, suku, agama dalam berteman. Tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu pertengkaran antar peserta didik, serta dapat mengerjakan tugas atau kegiatan pembelajaran secara berkelompok.

Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengikatkan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Melaksanakan pemilihan struktur kelas dilakukan secara musyawarah mufakat. Menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang menyangkut banyak orang dengan melakukan musyawarah. Tidak memaksakan kehendak dalam menentukan keputusan. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Menurut Kaelan (2007) Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Peserta didik selalu membiasakan diri untuk saling membantu dengan teman-teman dan warga sekolah. Berteman dengan siapa saja karena setiap orang berkedudukan sama. Bersikap adil dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah. Memberikan fasilitas yang sama terhadap semua peserta didik. Pendidik tidak boleh membedakan memberikan perlakuan terhadap peserta didik. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung di dalamnya prinsip asasi keadilan, keadilan sosial, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, Menurut (Wiyono, 2011) memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung di dalamnya prinsip asasi (a) Kepercayaan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (c) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (d) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.
2. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung di dalamnya prinsip asasi (a) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (b) Kejujuran; (c) Kesederajatan manusia; (d) Keadilan; dan (e) Keadaban.
3. Nilai-nilai Persatuan Indonesia, terkandung di dalamnya prinsip asasi (a) Persatuan; (b) Kebersamaan; (c) Kecintaan pada bangsa; (d) Kecintaan pada tanah air; dan (e) Bhinneka Tunggal Ika.

4. Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, terkandung di dalamnya prinsip asasi (a) Kerakyatan; (b) Musyawarah mufakat; (c) Demokrasi; (d) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan).
5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terkandung di dalamnya prinsip asasi (a) Keadilan; (b) Keadilan sosial; (c) Kesejahteraan lahir dan batin; (d) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; (e) Etos kerja.

Sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila adalah sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku sekaligus standar kebenarannya. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila (Untari, 2012). Sehingga Pancasila hendaknya mampu menyaring dampak dari Globalisasi yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka masyarakat Indonesia mampu mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional lainnya, guru maupun dosen yang tulus mengajar dengan baik dan ikhlas menuntun para siswa hingga mampu mengukir prestasi yang gemilang, pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara. Bukan itu saja nasionalisme juga dapat dibangun melalui karya seni seperti menciptakan lagu-lagu yang berslogan cinta tanah air, melukis, seni peran yang bertajuk semangat juang untuk negara dan karya-karya seni lainnya (Asmaroini, 2016).

Menurut (Alim & Al, 2011) Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa.

Kebhinnekaan

Pada dinding-dinding kelas di SMA Negeri 2 Palembang terdapat bingkai foto menggambarkan pemangku agama, tokoh pahlawan yang ada di Indonesia, tempelan gambar pakaian adat daerah, rumah adat, senjata tradisional dan lain-lain. Ini merupakan salah satu bentuk pengenalan kepada peserta didik bahwa kita sebagai Manusia Indonesia memiliki keanekaragaman suku, adat, budaya, bahasa dan lain-lain. Berkebinekaan global, dimensi tersebut berkenaan dengan kemampuan peserta didik merawat budaya luhur bangsa Indonesia, kebudayaan lokal dan identitas dirinya. Wujud perilakunya dibuktikan dengan bersikap terbuka ketika berhubungan dengan budaya lain pada tataran global sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan.

Konsekuensi logisnya memunculkan rasa toleransi diantara dua budaya, tidak menutup kemungkinan terjadi proses akulturasi yang berpeluang menghasilkan budaya baru yang positif serta tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Konsep kebhinnekaan global adalah rasa saling menghormati dan bertoleransi terhadap berbagai jenis perbedaan dalam konteks budaya global. Peserta didik dalam hal ini bisa menerima berbagai perbedaan, tanpa menghakimi, tanpa merasa dihakimi, serta menghindari sikap primordial. Perilaku demikian ini mulai diterapkan di lingkungan terkecil seperti sekolah dan masyarakat. Mengingat bangsa Indonesia merupakan negara yang pluralis. Sikap dan perilaku demikian terus dipertahankan dan dibawa dalam interaksinya dengan budaya dari negara lain. Unsur kunci kebhinnekaan global terwujud dalam kemampuan mengenali, memahami dan menghormati budaya lain, kemampuan dalam komunikasi lintas budaya serta hubungan dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman dalam perbedaan (Istianah et al., 2021).

Nilai kebhinekatunggalikaan juga terlihat saat peserta didik dapat berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan seperti ras, suku, agama dan budaya yang dimiliki oleh temannya. Selain itu, peserta didik membiasakan saling berjabat tangan atau menyapa dengan bapak dan ibu guru diterapkan setiap hari. Ini juga merupakan bentuk atau simbol yang menunjukkan bahwa manusia Indonesia adalah orang yang sopan, santun, ramah, cinta tanah air dan lain-lain yang sudah dibiasakan kepada anak sejak kecil. Serta, peserta didik saling membantu menjaga suasana kelas agar tetap dalam kondisi tenang sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman, aman, menyenangkan dan mendukung ekosistem pembelajaran.

Salah satu ciri karakter yang terkandung dalam Profil Pelajar Pancasila adalah berkebinekaan global. Pelajar yang memiliki ciri ini memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas serta berpikiran terbuka dengan budaya lain. Sehingga akan tumbuh rasa saling menghargai budaya antar bangsa. Guna mewujudkan ciri tersebut, perlu pemahaman mengenai nilai-nilai kebhinnekaan. Makna toleransi dalam kebhinnekaan adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan Bahasa. (Arrosyid, 2022).

Keragaman budaya Indonesia dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. (Kansil & Kansil, 2002) mengemukakan bahwa “persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa”. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya suatu slogan tetapi merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa berlangsung selama berabad-abad lamanya, sehingga Indonesia tumbuh dalam suatu keragaman yang kompleks. (Mahfud, 2013) berpandangan bahwa pada hakikatnya sejak awal para founding fathers bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis kita. Singkatnya bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa Indonesia menganut semangat Bhinneka Tunggal Ika, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi obsesi rakyat kebanyakan. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita itu adalah toleransi.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai kunci dan pemersatu keragaman bangsa Indonesia merupakan ciri persatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultur. (Sujanto, 2009) memaparkan bahwa “lahirnya Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan tersebut. Bahkan kesadaran perlu adanya persatuan dari keragaman itu terkristalisasi kedalam ‘Soempah Pemoeda’ tahun 1928 dengan keindonesiaannya yang sangat kokoh”. Untuk memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika yang tercetus pada Kongres Sumpah Pemuda, penting kiranya penulis memaparkan konsep Bhinneka Tunggal Ika terlebih dahulu. (Sujanto, 2009) juga memaparkan bahwa Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Sesanti artinya kalimat bijak (wise-word) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat (sesanti) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat istiadat, bahasa daerah, budaya dan

lainnya yang mewujudkan menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.

Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit yang lainnya akan ikut merasakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Falk yang memandang bahwa “keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya”. Sejalan dengan hal tersebut, “Bagi Bung Karno keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah suatu given. Hal ini bisa dimengerti karena ia sangat dipengaruhi oleh semangat Sumpah Pemuda, yang dengan ikrar itu menyatakan persatuan masyarakat Indonesia” (Tan, 2008).

Keragaman sebagai given (pemberian) yang dapat bermakna bahwa keragaman merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai modal yang oleh Falk dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidup. (Sujanto, 2009) berpandangan bahwa Sasanti Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna persaudaraan atau perseduluran harus disosialisasikan kepada seluruh rakyat, melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pemerintah, swasta, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan, agar terbangun hidup yang rukun, damai, aman, toleran, saling menghormati, bekerjasama dan bergotong-royong dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut (Syaifullah, 2007) berpandangan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memberikan pelajaran agar semua penduduk Indonesia menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu tujuan nasional yaitu terciptanya sebuah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia sebagai satu bangsa senantiasa diperlukan untuk mengatasi segala perbedaan yang ada baik suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat. Keragaman tersebut disikapi sebagai faktor yang membentuk kesatuan sebagai sebuah bangsa. Di dalam kehidupan berbangsa, keragaman yang ada perlu dipupuk dan dipelihara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip sebagai satu bangsa. Kesadaran bangsa Indonesia satu bangsa dengan keragamannya tercermin dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut menjadi dasar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan bangsa dan negara Indonesia. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika

memuat sejumlah prinsip, yaitu dalam membentuk kesatuan dan berbagai keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika tidak membentuk konsep baru seperti agama baru. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalisme yang hanya memperlihatkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen (menyatukan) tidak divergen (Koentjaraningrat, 2014).

KESIMPULAN

Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik.

Dimensi profil pelajar Pancasila terbagi menjadi enam yaitu: pertama, beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan nilai Keenam adalah bernalar kritis. Nilai-nilai kebhinekatunggalikaan seperti gotong royong, menghargai perbedaan diantara sesama manusia dapat menjadi bahan enkulturasi bagi peserta didik. Menciptakan generasi muda yang Pancasilais menjadi tanggung jawab bersama di bidang pendidikan demi tercipta generasi Indonesia yang memiliki keunggulan intelektual dibalut karakter yang baik.

Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran yang sangat penting. Pengembangan multikulturalisme mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, dapat membawa pada perpecahan dan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang bernafaskan nilai-nilai kebhinnekaan. Membangun masyarakat multikultur Indonesia harus diawali dengan keyakinan bahwa dengan bersatu kita memiliki kekuatan yang lebih besar.

DAFTAR REFERENSI

Alim, M. A., & Al, A. (2011). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Menumbuhkan Nasionalisme Bangsa. *Yogyakarta: STMIK "AMIKOM" Yogyakarta.*

- Arrosyid, H. (2022). IMPROVISASI MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF “e-KonTraS “DALAM MENGAKTUALISASIKAN PROFIL PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN. *Berajah Journal*, 2(4), 795–810.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi nilai-nilai pancasila bagi siswa di era globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440–450.
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Melinda, L. G., Priantini, R., Zubaedah, Z., Suharti, S. R., & Khodijah, S. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Pada Peserta Didik di SD Negeri 187/1 Teratai. *PENDAS MAHAKAM: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 4(2), 137–145.
- Hardiman, D. (2002). *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. JSTOR.
- Ismail, M. J. (2021). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dan Menjaga Kebersihan di Sekolah. *Guru Tua: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 59–68.
- Istianah, A., Mazid, S., Hakim, S., & Susanti, R. (2021). Integrasi nilai-nilai pancasila untuk membangun karakter pelajar pancasila di lingkungan kampus. *Jurnal Gatranusantara*, 19(1), 62–70.
- Juliani, A. J., & Bastian, A. (2021). Pendidikan karakter sebagai upaya wujudkan Pelajar Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2002). Modul Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jakarta: Pradya Paramita*.
- Kirnandita, P. (2017). *Menimbang Untung dan Urgensi Kartu Identitas Anak*. Tirto. Id.
- Koentjaraningrat. (2014). *Pengantar Antropologi Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Yrama Widya.
- Mahfud, C. (2013). *Pendidikan multikultural*.
- Margono. (2012). *Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila dalam Margono (Ed). Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*. Universitas Negeri Malang (UM Press).
- Rahayuningsih, Y. S., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan kepala sekolah dalam menciptakan budaya sekolah yang positif di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7850–7857.
- Sujanto, B. (2009). *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan)*. Sagung Seto.
- Syaifullah, A. (2007). *Merukunkan umat beragama: studi pemikiran Tarmizi Taher tentang kerukunan umat beragama*. Grafindo Khazanah Ilmu.
- Tan, M. G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia: kumpulan tulisan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Untari, S. (2012). Pancasila dalam Kehidupan Berasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” dalam Margono. *Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan Dan Kebangsaan*.
- Wiyono, S. (2011). *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Universitas Wisnuwardhana Malang Press.